



**PENETAPAN**

**Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Rtu**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA RANTAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

**1. SAHRUL IHWAN bin PANSYAH**, NIK  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tapin,  
17 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan Karyawan PT. BAS, bertempat tinggal di  
RT 001 RW 001, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Binuang,  
Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan  
domisili elektronik pada alamat email:  
xxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

**Pemohon I;**

**2. ISTI LESTARI binti RUNDI**, NIK  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir  
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 05 April 1995, agama Islam,  
pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di RT 001 RW 001,  
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Binuang, Kabupaten Tapin,  
Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada  
alamat email: xxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Rtu, tanggal 15 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 September 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II yang bernama TRI WARGANA dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan berlangsung. Adapun yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu yang bernama MASRUDIN dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: USUF dan KADIR sesuai dengan Surat Keterangan Menikah dari Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Mei 2024;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Tercatat dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun;
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK, lahir di Tapin, 18 Maret 2019;**
4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 6 Maret 2024;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak atas nama **ANAK** dari Pengadilan Agama

halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Induk Anak dan Kartu Keluarga di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK, lahir di Tapin, 18 Maret 2019** sebagai anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk tujuan pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Induk Anak dan Kartu Keluarga di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan terdapat perubahan berupa perbaikan posita dan petitum sebagai berikut:

- Posita angka 5: yang sebelumnya tertulis "Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak atas nama ANAK dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran, **Kartu Induk Anak** dan Kartu Keluarga di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin".

Diubah menjadi : "Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak atas nama ANAK dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran, **Kartu Identitas Anak** dan Kartu Keluarga di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin".

halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petitum angka 3 : yang sebelumnya tertulis “Menetapkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk tujuan pengurusan Akta Kelahiran, **Kartu Induk Anak** dan Kartu Keluarga di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin”.

Diubah menjadi : “Menetapkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk tujuan pengurusan Akta Kelahiran, **Kartu Identitas Anak** dan Kartu Keluarga di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin”.

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Mei 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 6 Maret 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 Maret 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.3;
4. Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Maret 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas

halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.4;

**B. Saksi-saksi:**

1. **RINI SUNDARI Binti RUNDI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX KM 91 RT 002 RW 001 Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernama ANAK dan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara hukum Islam pada 08 September 2017 secara syariat Islam di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- Bahwa alasannya adalah karena pada saat itu Pemohon II belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan tercatat disebabkan belum bercerai secara resmi dengan mantan suaminya yang terdahulu;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung (Adik kandung) Pemohon II yang bernama TRI WARGANA, (yang juga sekaligus menikahkan Para Pemohon) dan yang menikahkan adalah Penghulu kampung bernama MASRUDIN;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu USUF dan KADIR yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dalam usia 22 tahun;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Saksi lupa tanggal lahirnya, namun yang pasti anak tersebut lahir sekitar lebih dari 1 (satu) tahun setelah pernikahan mereka;
- Bahwa anak yang bernama ANAK adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;

2. **MONICA YULIANTI binti YONGKI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX RT 002 RW 001 Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernama ANAK dan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;

halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Rtu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada 08 September 2017 secara syariat Islam di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- Bahwa alasannya adalah karena pada saat itu Pemohon II belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan tercatat disebabkan belum bercerai secara resmi dengan mantan suaminya yang terdahulu dan Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Penghulu kampung bernama MASRUDIN, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung (Adik kandung) Pemohon II yang bernama TRI WARGANA, mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai yang dibayar secara tunai, dan saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu USUF dan KADIR (Saksi sendiri) yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dalam usia 22 tahun;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Saksi lupa kapan anak tersebut lahir, namun yang Saksi ketahui anak tersebut lahir dengan batas yang normal;
- Bahwa anak yang bernama ANAK adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;

halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar mendapatkan penetapan asal usul anak terhadap anak yang bernama ANAK;
2. Bahwa para Pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran bagi anak para Pemohon tersebut karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
3. Bahwa para Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan para Pemohon;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi surat keterangan menikah) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg. *jo.* Pasal 1875 KUHPerdara, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri dan hidup sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 08 September 2017. Hakim menilai bukti P.1 tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 06 Maret 2024 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu keluarga) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa para Pemohon adalah satuan keluarga yang terdiri dari kepala keluarga, istri dan anak-anak Pemohon II dengan mantan suami terdahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat keterangan lahir) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg. *jo.* Pasal 1875 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK yang dilahirkan di Tapin pada tanggal 18 Maret 2019 adalah anak kandung para Pemohon. Hakim menilai bukti P.4 tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima serta dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 08 September 2017 di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir di Tapin pada tanggal 18 Maret 2019;
1. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dalam usia 22 tahun;
2. Bahwa ANAK benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 06 Maret 2024 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
2. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon bernama ANAK, lahir di Tapin pada tanggal 18 Maret 2019;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam bagian akhir pertimbangan dan diktum penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tentang permohonan ditetapkannya anak yang bernama ANAK sebagai anak sah para Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

*halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Rtu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan para Pemohon, Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon dan para saksi juga mengetahui kehamilan Pemohon II hingga melahirkan anak-anak karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *I'ānatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim yaitu:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ  
صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya."

Menimbang, bahwa Hakim juga mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً رَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ  
لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain.”

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: “Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan.” (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Banjar, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, di mana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan juga harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- Karena perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah

halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Rtu



satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non-muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal; c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahinya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu minimal enam bulan setelah pernikahan;
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, anak para Pemohon yang bernama ANAK, lahir setelah pernikahan sirri para Pemohon dilaksanakan, maka setelah diteliti, diketahui bahwa kelahiran 1 (satu) orang anaknya telah melewati waktu minimal 6 (enam) bulan sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari para Pemohon yang sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul dan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II);

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari

halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sah sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifzh al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*);

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak bernama ANAK adalah anak sah para Pemohon;

## Pertimbangan Peruntukan Penetapan

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tentang peruntukan permohonan penetapan asal-usul anak ini adalah bertujuan untuk pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya ANAK sebagai anak sah para Pemohon, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran anak, kartu identitas anak dan kartu keluarga baru dimana di dalamnya tercantum identitas anak sebagai anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

## Biaya perkara

halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Rtu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK** lahir pada tanggal 18 Maret 2019 adalah anak sah dari Pemohon I (**SAHRUL IHWAN bin PANSYAH**) dan Pemohon II (**ISTI LESTARI binti RUNDI**);
3. Menetapkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk tujuan pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Hakim Tunggal,

Ttd.

**Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.**

**Perincian Biaya:**

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. PNBP              |                      |
| a. Pendaftaran       | : Rp30.000,00        |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00        |
| c. Redaksi           | : Rp10.000,00        |
| 2. Proses            | : Rp75.000,00        |
| 3. Panggilan         | : Rp 0,00            |
| 4. Meterai           | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah               | : Rp145.000,00       |
- Terbilang (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*).

halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Rtu